

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan metode skoring dan overlay terhadap parameter kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan, teridentifikasi sejumlah wilayah dengan tingkat ancaman rendah hingga tinggi terhadap bencana tanah longsor. Sementara itu, ancaman letusan gunung api ditunjukkan oleh keberadaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) I, KRB II, dan KRB III yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik Gunung Bromo, Gunung Tengger, dan Gunung Lemongan.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat 72 desa yang tersebar di 8 kecamatan berada dalam zona ancaman tanah longsor, yaitu Kecamatan Gading, Krucil, Kuripan, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, dan Tiris. Adapun untuk ancaman letusan gunung api, terdapat 23 desa pada 6 kecamatan yang termasuk dalam kawasan terdampak, meliputi Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Sukapura, Sumber, dan Tiris.

Setelah dilakukan proses observasi lapangan, diperoleh 50 desa yang terverifikasi rawan bencana tanah longsor dan desa yang terverifikasi rawan bencana letusan gunung api. Berdasarkan hasil penilaian melalui kuesioner Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) dengan 5 komponen, 32 indikator, dan 128 pertanyaan, terdapat 47 desa yang masuk dalam kategori Desa Pratama dan 3 Desa Madya dan tidak ada desa yang masuk dalam kategori Desa Utama. dan bahwa sebagian besar desa baru berada pada tahap inisiasi awal dalam hal kebijakan, kelembagaan, dan program penanggulangan bencana. Hanya sebagian kecil desa yang telah memiliki upaya sistematis terkait pengkajian risiko, mitigasi, dan kesiapsiagaan darurat. Kondisi ini tercermin dari hasil penilaian di mana seluruh desa di Kecamatan Gading, Sumber, Sukapura, Pakuniran, Lumbang, dan Kuripan seluruhnya masuk dalam kategori Desa Pratama, sementara hanya Desa Andung Biru dan Ranu Gedang di Kecamatan Tiris serta Desa Sumberduren di Kecamatan Krucil yang berhasil mencapai kategori Desa Madya.

Hasil penilaian ketangguhan desa secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak ada desa yang mencapai kategori Desa Utama, yang berarti belum ada desa di wilayah terdampak yang memiliki sistem penanggulangan bencana yang mandiri dan terkonsolidasi secara penuh. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya peningkatan ketangguhan desa yang terstruktur melalui pembentukan, perencanaan, dan evaluasi tiap komponen ketangguhan bencana.

Upaya peningkatan ketangguhan desa perlu dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait. Strategi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan kelembagaan dan koordinasi penanggulangan bencana, pengembangan program pengurangan risiko bencana, serta pembentukan dan pemberdayaan kelompok pengelola risiko bencana di tingkat desa. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Probolinggo.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian, dirumuskan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas desa dalam menghadapi risiko bencana serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berikut rekomendasi perencanaan untuk peningkatan Desa Tangguh Bencana Kriteria Pratama yaitu:

1. Adanya penyusunan mandiri peta bahaya skala desa.
2. Adanya penyusunan mandiri peta kerentanan skala desa.
3. Adanya penyusunan mandiri peta kapasitas skala desa.
4. Adanya penyusunan dokumen rencana penanggulangan daerah skala desa.
5. Pembentukan tim relawan penanggulangan bencana desa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan pendidikan kebencanaan bagi para anggota dan Masyarakat umum.

Berikut rekomendasi perencanaan untuk peningkatan Desa Tangguh Bencana Kriteria Madya yaitu:

1. Membangun kemandirian informasi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bagi Masyarakat yang ada di desa melalui platform digital seperti WhatsApp Grup/Story, Instagram Postingan/Story, dan Facebook.
2. Perencanaan jalur dan fasilitas evakuasi, berupa peta evakuasi, rambu penunjuk arah, jalur evakuasi, serta titik evakuasi aman.
3. Pengutan mekanisme bencana lintas Lembaga hingga Masyarakat desa melalui forum pengurangan risiko bencana.
4. Pemasangan sistem peringatan dini secara mandiri berupa sirine kebencanaan.
5. Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan daerah tim relawan penanggulangan bencana secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut.